

ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan *rapprochement* Rusia dan Jepang di tahun 2016 sebagai respon kedua negara dalam menghadapi dinamika sistem internasional kontemporer. Dengan mengambil jangka waktu 2012 hingga 2016, skripsi ini berlatar belakang pada upaya negosiasi yang berlandaskan pada *framework* baru terkait penyelesaian permasalahan Kepulauan Kuril Selatan sebagai determinan utama disepakatinya pakta perdamaian. Penelitian yang memosisikan Rusia dan Jepang sebagai aktor utama ini berusaha untuk menjawab pertanyaan terkait faktor-faktor apa sajakah yang mendorong diimplementasikannya kebijakan *rapprochement* di tahun 2016. Jawaban tersebut dikerangkakan melalui konsep transisi tatanan hierarkis pasca Perang Dingin, teori siklus panjang Modelski, dan *hedging*. Proses analisis menggunakan metode *content analysis* terhadap dokumen resmi, buku, jurnal, dan pernyataan resmi dalam penelitian ini mampu menghasilkan jawaban terkait faktor-faktor apa yang mendorong implementasi kebijakan *rapprochement* Rusia-Jepang. Penelitian ini menemukan bahwa setidaknya terdapat dua alasan utama di balik pengimplementasian kebijakan tersebut. Pertama, adanya transisi tatanan internasional menuju ke arah hierarkis yang disertai dengan adanya fase dekonsentrasi internasional membuat perpolitikan global menjadi kompleks dan tidak pasti. Kedua, situasi tersebut membuat Rusia dan Jepang mengimplementasikan strategi *hedging* dalam bentuk kebijakan *rapprochement* dalam rangka mengamankan kepentingan mereka di masa depan. Melalui temuan tersebut, terdapat sebuah pemahaman terkait arti penting eksplanan sistemik dalam analisis kebijakan luar negeri dan respon negara *third-tier* ketika menghadapi situasi ketidakpastian serta kompleksitas relasi antarnegara di level internasional sebagai konsekuensi dinamika sistem internasional kontemporer.

Kata-Kata Kunci: kebijakan luar negeri, Rusia, Jepang, sistem internasional, *hedging*, Kepulauan Kuril Selatan